

Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar

Chumi Zahroul Fitriyah¹, Rizki Putri Wardani²

chumi.fkip@unej.ac.id¹, rizkiputriwardani.fkip@unej.ac.id²

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Jember^{1,2}

Paradigm of Independent Curriculum for Elementary Teacher School

ABSTRACT

Independent curriculum was dream of implementation curriculum after pandemic. It has a several principle, on of them was flexibility. Its means that school can apply this curriculum based on the environment. But, this curriculum was very newby for being implemented by teacher. The objective of this research was describing kurikulum merdeka by conceoptual that would be implemented in 2025 later. The research method used was a descriptive qualitataive. Collecting data used depth interview and literature review from journal about Kurikulum Merdeka. Analyzing data used Miles model, there were three steps, 1) collecting data, 2) verification, and 3) conclusion. Based on the result, this curriculum can be implemented in various regions. The preparation teacher to face of this independent curriculum were join the workshop about this curriculum helds by educational and private institutions. Based on interview with other elemntary school teacher, they gave an enthusiastic response in this curriculum. It hope this curriculum that would be implemented can be gain our goals Indonesian education.

Keywords: *Independent Curriculum, Elementary School Teacher*

Article Info

Received date: 30 April 2022

Revised date: 7 September 2022

Accepted date: 28 September 2022

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum terjadi secara sistematis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagaimana yang telah diketahui pada tahun 2020 pendidikan mengalami banyak perubahan dikarenakan efek dari pandemi covid 19 (Faiz & Kurniawaty, 2020). Lembaga sekolah sering merubah beberapa kebijakan sesuai dengan peraturan yang terbaru dan disesuaikan dengan kondisi di lembaga sekolah. Beberapa perubahan dimulai dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat yang diimplementasikan sesuai dengan kondisi serta mengambil beberapa kompetensi yang dirasa dapat dicapai.

Pengimplementasian kurikulum darurat di lembaga sekolah seperti menjadikan bom atom bagi sekolah itu sendiri. Bahwasanya pelaksanaan kurikulum 2013 sebenarnya belum dilakukan secara maksimal, hal itu sesuai dengan penelitian di daerah Yogyakarta bahwa dari 33 sekolah yang didata, 17 diantaranya belum siap untuk melaksanakan suatu perubahan kurikulum (Suyanto, 2017). Isi dari kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif yang akan dintegrasikan oleh kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan.

Selain itu, pada zaman sekarang guru dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi guna mendukung revolusi industri 4.0 (Astutik et al., 2022). Kemampuan ini juga harus dikuasai dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara online maupun hybrid karena efek pandemi covid 19. Perubahan yang paling dirasa nampak pelaksanaan proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Penerapan pada era revolusi 21 membutuhkan pengembangan, pengetahuan, keterampilan dengan harapan peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah serta membangun kolaborasi secara bersama.

Keterbatasan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi setidaknya terdapat enam strategi yang harus dilakukn oleh lembaga sekolah (Pratiwi & Utama, 2020) diantaranya wilayah akses internet yang mendukung dan dukungan dari guru yang sudah melek digital. Kedua keterampilan guru dan siswa dalam mendukung keterampilan seperti pemberian

tugas dilakukan secara terbatas melalui media sosial. Ketiga akses internet yang masih terbatas terlebih untuk daerah yang pelosok. Keempat, beberap sekolah memanfaatkan radio lokal untuk menyebarkan penugasan. Kelima, penugasan bersifat dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, beberapa sekolah harus meliburkan peserta didik dikarenakan keterbatas akan hal tersebut.

Berangkat dari beberapa permasalahan dan keterbatasan tersebut, pemerintah telah memberikan suatu penawaran untuk mengimplementasikan kurikulum darurat yang disesuaikan dengan kondisi lembaga sekolah. Penerapan kurikulum prototipe atau darurat ini pada tahun 2021 dibuktikan dengan pelibatan kurang lebih 2500 satuan pendidikan di 34 provinsi.

Berdasarkan implementasi kurikulum yang dilakukan di masa pandemi, didapatkan fakta bahwa lembaga yang menggunakan kurikulum darurat mendapatkan capaian pembelajaran yang baik daripada menggunakan kurikulum 2013. Survei ini dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1 sampai 3 di SD di 612 sekolah di 20 kab/kota dari 8 provinsi menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan darurat (Kemdikbudristek, n.d.).

Berbeda dengan pencapaian hasil belajar, berdasarkan penelitian dari (Rosidah et al., 2021) bahwa hasil FGD yang melibatkan 50 guru di Mojokerto menunjukkan guru mengalami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penilaiannya yang terlalu rumit yang akan diimplementasikan ke dalam kurikulum merdeka. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya guru memiliki keresahan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, tetapi ada juga hasil yang menampilkan kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji mengenai paradigma pandangan kurikulum merdeka oleh guru sekolah dasar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan paradigma kurikulum merdeka oleh guru yang akan diimplementasikan di lembaga sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No 20 Tahun 2003). Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah dan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok satuan pendidikan.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, nilai Pancasila, potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, serta tuntutan perkembangan teknologi. Di pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, dan muatan lokal.

Pada akhir bulan Agustus 2021 di mana pandemi masih berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan (kurikulum darurat). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020. Keputusan ini berisikan untuk menggunakan kurikulum darurat untuk penyederhanaan dari kurikulum 2013 secara mandiri. (Puskurbuk, 2020) menemukan bahwa guru di Indonesia masih berketat pada penyiapan dokumen yang bersifat administratif. Penelitian dari (Aeini, 2019) ditemukan bahwa guru tidak termotivasi untuk membuat RPP, karena proses pembelajaran di kelas secara langsung lebih penting daripada pembuatan RPP yang rumit. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan yang dikembangkan dari silabus guna mencapai Kompetensi Dasar. Tetapi pada realitanya pendidik masih belum berhasil dalam membuat RPP yang sesuai.

Kurikulum harus dibuat sefleksibel mungkin untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik dan mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Penelitian dari (Li et al., 2021) didapatkan bahwa

evaluasi pembelajaran selama pandemi memberikan banyak rekomendasi untuk kurikulum harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang terjadi dan tidak memberi beban kepada siswa dalam memberikan pembelajaran. Dari beberapa hasil evaluasi dan telaah, penggunaan kurikulum di Indonesia perlu penyempurnaan dan pengkondisian sesuai dengan kebutuhan terkini akan mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik (Kemdikbudristek, n.d.)

Perancangan kurikulum merdeka merujuk beberapa prinsip yakni, 1) standar capaian disiplin ilmu memperhatikan prinsip fokus, ajeg, dan koheren; 2) kemampuan untuk transfer kompetensi interdisipliner, dan pilihan; 3) keaslian, fleksibilitas, dan keselarasan; dan 4) pelibatan, keberdayaan atau kemerdekaan siswa, dan keberdayaan atau kemerdekaan guru. landasan utama perancangan kurikulum merdeka merupakan filosofi merdeka belajar yang juga melandasi kebijakan pendidikan lainnya yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Perubahan paradigma yang dituju untuk menguatkan kemerdekaan guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran, melepaskan kontrol standar yang mengikat dan menuntut proses pembelajaran yang homogen di seluruh satuan pendidikan Indonesia. Pengimplementasian kurikulum merdeka ini nantinya akan dapat mewujudkan hak dan kemampuan peserta untuk menentukan proses pembelajarannya melalui penetapan tujuan belajar, merefleksikan kemampuan, serta mengambil langkah secara proaktif dan tanggung jawab untuk kesuksesan dirinya sendiri. Implikasinya guru sendiri juga dituntut untuk mampu mempersiapkan proses pembelajaran dengan efektif sehingga efektivitas dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai. (Fatma & Mustafa, 2016)

Selain 4 prinsip yang telah ditulis dalam implementasi kurikulum merdeka, prinsip yang menjadi pegangan dalam proses perancangan kurikulum adalah, sederhana, mudah dipahami dan diimplementasi, fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik, fleksibel, selaras, bergotong royong, dan memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.

Dalam perubahan kurikulum yang digunakan saat ini dikenal sebagai kurikulum merdeka atau konsep merdeka belajar. Menurut pendapat (Ainia, 2020) bahwasanya kurikulum merdeka belajar ini sesuai dengan cita-cita tokoh nasional Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana berfokus pada kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif, yang nantinya berdampak pada terciptanya karakter peserta didik yang memiliki karakter yang merdeka. Terdapat pula beberapa kebijakan kurikulum merdeka diantaranya pergantian USBN menjadi asesmen kompetensi, pergantian ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, serta perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang biasanya memuat 20 lembar halaman sekarang cukup satu lembar halaman yang memuat tiga komponen, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian (Wijaya et al., 2020).

METODE PENELITIAN

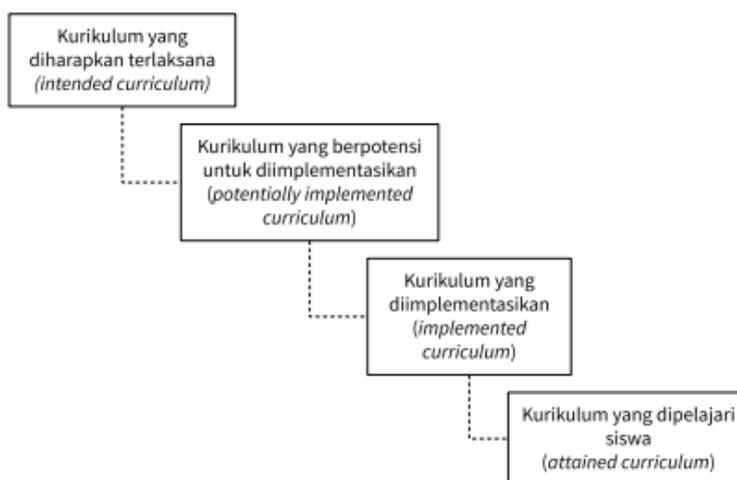
Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil temuan berupa paradigma kurikulum merdeka yang diambil dari artikel yang relevan, dan buku pedoman kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Faiz & Kurniawaty, 2020). Sumber data yang diambil dari wawancara dengan guru, hasil kajian dan studi Pustaka dari beberapa sumber kebijakan kurikulum merdeka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada guru yang sekolahnya akan menerapkan kurikulum merdeka, dan studi dokumen dari beberapa studi Pustaka. Wawancara dilakukn secara mendalam oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban sebagai data primer. Studi Pustaka yang dicari dengan menggunakan kata kunci kurikulum merdeka di jejaring internet. Setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya dilakukn analisis data menggunakan model analisis Miles yang memiliki tiga tahapan yaitu proses pengumpulan data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan melalui studi pustaka dan wawancara yang telah dilakukan secara mendalam (Huberman, 2014). Hal ini dilakukn agar dalam penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan kurikulum yang terjadi selama pandemi memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Lembaga pendidikan harus memberikan perubahan atau inovasi bagaimana pembelajaran yang seharusnya dilakukan supaya tujuan yang tercantum dalam Sisdiknas bisa tercapai. Adanya perubahan karena pandemi Covid 19 memberikan dampak yang sangat besar bagi pendidikan, terjadinya *learning loss* akibat adanya tidak optimalnya pembelajaran yang diimplementasikan selama pandemi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Astutik et al., 2022) bahwasanya akibat pandemic Covid-19 memberikan efek yang signifikan terhadap hasil belajar. Terdapat pembatasan aktifitas social berupa pembatasan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, dan diganti dengan pembelajaran secara daring. Dari hal tersebut tidaklah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan.

Keadaan ini menyebabkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai penyelenggaraan belajar dari rumah pada masa darurat (Gopal et al., 2021). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan jenis kurikulum yang akan diimplementasikan di lembaga sekolah. Salah satu pilihannya adalah Kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini memberikan kebebasan bagi lembaga sekolah untuk mengaplikasikan kurikulum berdasarkan dengan lingkungannya dan prioritas. Namun kurikulum ini masih merupakan pilihan bagi lembaga pendidikan, apakah akan mengimplementasikan atau tidak. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2022 sampai 2024 nantinya hanya ada tiga kurikulum yang diberlakukan (Rozandy & Koten, 2021). Diharapkan nantinya setelah 2024 kurikulum merdeka ini dapat diimplementasikan oleh lembaga sekolah. Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek (Adisya Yusup, 2021)

Perancangan kurikulum merdeka ini telah dikaji berdasarkan keselarasan antara kebijakan kurikulum di tingkat nasional yang lebih abstrak dengan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan sampai dengan kurikulum yang benar benar dipelajari oleh peserta didik (Valverde, 2002)



Gambar 1. Kerangka Kurikulum Nasional Lokal (Valverde, 2002)

Berdasarkan dari gambar 1 dapat dilihat bahwasanya terdapat empat tahapan dimana kurikulum bisa digunakan sampai ke siswa. Tahapan pertama yakni *intended curriculum* atau kurikulum yang diharapkan merupakan kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik hingga bagaimana cara mempelajarinya. Kedua *potentially implemented curriculum* atau kurikulum yang berpotensi untuk diimplementasikan yakni kurikulum yang akan diinterpretasikan dan diajarkan di satuan pendidikan. Ketiga adalah *implemented curriculum* atau kurikulum yang diimplementasikan, tahap ini merujuk ke buku teks yang digunakan pada pembelajaran. Dan yang terakhir adalah *attained curriculum* atau kurikulum yang dipelajari siswa. Ini merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa setelah menggunakan kurikulum.

Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, yakni yang pertama sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, Prinsip sederhana merupakan rancangan kurikulum nantinya mudah dipahami dan diimplementasikan di satuan pendidikan.

Perubahan yang cukup besar dapat disederhanakan dengan cara memberikan dukungan implementasi secara bertahap kepada satuan pendidikan dan pendidik (Fullan, 2006). Beberapa poin yang perlu diperhatikan pada prinsip sederhana adalah melanjutkan kebijakan dan praktik baik yang telah diatur sebelumnya, rancangan yang logis dan jelas, beragam dukungan dan bantuan untuk mengimplementasikan kurikulum. Prinsip kedua adalah fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik. Terdapat istilah fokus yang memiliki makna memusatkan perhatian pada konten pelajaran yang berarti memadatkan materi namun secara mendalam dan berkualitas. Berdasarkan (Beatty et al., 2021) bahwa beberapa negara berkembang yang salah satunya Indonesia, materi pelajaran yang sangat padat membuat guru terus bergerak cepat untuk menyelesaikan materinya tanpa memedulikan kemampuan pemahaman siswa. Hal ini dikarenakan bukan guru tidak menghiraukan kemampuan peserta didik, tetapi mereka dituntut untuk menuntaskan materi pembelajaran. Beberapa poin yang penting dalam tahap ini adalah mengurangi materi pelajaran, pembelajaran berpusat pada siswa, penguatan literasi dan numerasi.

Prinsip ketiga adalah fleksibel. Salah satu prinsip dari perancangan kurikulum merdeka di satuan pendidikan adalah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyederhanakan atau mengurangi konten dengan pemisahan antara kerangka kurikulum dengan kurikulum operasional. Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia memiliki keberagaman satuan pendidikan yang tidak sama di setiap daerah. Tingkat kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum juga berbeda. Maka dari itu implementasi dirancang sebagai suatu tahapan belajar. Prinsip keempat adalah selaras. Keselarasan ini berkaitan dengan tiga hal (Trebeck et al., 2021) keselarasan antara kurikulum, proses belajar, dan asesmen, 2) keselarasan kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru, 3) keselarasan kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran individu. Contoh dari keselarasan ini seperti komparasi capaian pembelajaran dengan kerangka asesmen literasi dan numerasi dalam asesmen nasional. Selaras dengan kebutuhan untuk menguatkan literasi, kebijakan kurikulum merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis literasi di seluruh mata pelajaran.

Prinsip kelima adalah gotong royong. Perancangan kurikulum merdeka melibatkan beberapa institusi termasuk Universitas, Sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Akhir tahun 2019 beberapa akademisi LPTK dan universitas dilibatkan untuk melakukan refleksi terhadap kurikulum 2013 dan merumuskan ide perubahan kurikulum agar dapat lebih fleksibel. Prinsip terakhir adalah memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Kurikulum perlu dirancang dengan berbasis pada data yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis konsep dari kurikulum merdeka yang diambil dari kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi lingkungan, dan capaian kompetensi yang menjadi tujuan utama. Untuk mendorong transformasi ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mencangkam ke dalam program sekolah penggerak yang nantinya mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka ini (Kholisdinuka, 2020)

Salah satu program untuk melancarkan kurikulum merdeka ini adalah program guru penggerak. Di mana program ini memberikan stimulus bagi guru untuk berkembang lebih baik dan merujuk pada nilai Pancasila (Faiz et al., 2022). Program ini merupakan salah satu solusi yang diterapkan Kemdikbudristek untuk mempersiapkan dan merekonstruksi paradigma pendidikan supaya eksis di tengah era pendidikan yang menglobal ini. Kurikulum merdeka merupakan wewenang satuan pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kebebasan dalam penyesuaian tersebut diharapkan mampu meratakan kualitas pembelajaran. Kebebasan dalam hak ini bertujuan agar pendidik dan peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kurikulum merdeka juga mampu mendorong guru lebih kreatif dan inovatif. Merdeka belajar bermakna bahwa memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa.

Hasil wawancara dari beberapa guru Sekolah Dasar pandangan mereka mengenai kurikulum merdeka bahwa kurikulum ini perlu lebih sosialisasi lebih detail. Beberapa guru menyambut baik dan kurang antusias terhadap perubahan kurikulum ini. Penyambutan baik ini dikarenakan konteks dari RPP yang akan diimplementasikan akan dipadatkan dan lebih terkonsentrasi pada capaian pembelajaran yang benar benar diharapkan. Selain itu kurang antusiasnya guru karena guru harus merombak kembali

RPP beserta perangkatnya seperti bahan ajar hingga penilaiannya yang akan berubah. Namun antusiasme dari guru juga mendorong implementasi kurikulummerdeka ini efektif.berdasarkan penelitian (Cheung & Man Wong, 2012), antusiasme dan motivasi instrinsik untuk melakukan perubahan dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik merupakan kontribusi dan keberhasilan implementasi kurikulum ini.

Pada tahap persiapan pembelajdan dalam kurikulum merdeka dimulai dari perencanaan pembelajaran yang dituangkan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Dalam kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran dituangkan dalam empat aspek penting, yang pertama pengumpulan data karakteristik satuan pendidikan yang akan digunakan dalam penyusunan modul. Kedua penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang digunakan di tiap tiap satuan pendidikan. Ketiga penyusunan modul ajar. Dan terakhir penyusunan modul proyek penguatan profil pancasila.

Bagi guru sekolah dasar pengimpelentasian kurikulum merdeka ini merupakan hal yang lumrah, dikarenakan kurikulum pastinya mengalami perubahan dari waktu ke waktu berdasarkan keadaan. Menurut beberapa guru yang diwawncarai, bahwa kurikulum merdeka ini merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk menyelaraskan tujuan pendidikan Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan global tanpa meninggalkan karakteristik pancasila. Pengimplementasian kurikulum merdeka nantinya di sekolah dasar dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Namun guru sekolah dasar masih belum memahami isi konteks dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Seringnya mereka untuk mengikuti Workshop dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun swasta memberikan informasi bagi guru sekolah dasar sembari menunggu rancangan yang pasti dari Kemdikbudristek.

Kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh perencanaan proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan untuk pedoman pembelajaran. Berdasarkan sumber PSKP, 2021, jenjang Sekolah Dasar telah menyusun KOS dan ditetapkan di lembaga masing masing



Gambar 2. Presentase Sekolah Dasar yang Menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (PSKP, 2021)

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa sebesar 12,82% lembaga masih dalam tahap proses penyusunan, 22,06% sudah selesai menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan namun belum ditetapkan, dan 64,83% sudah selesai disusun dan ditetapkan. Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ini tidak terlepas dari peran dari guru. Pelibatan guru dikarenakan yang tahu aspek kondisi lingkungan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Guru dalam penyusunan kurikulum ini memiliki kewajiban dalam pemberian kemampuan esensial yang mendalam pada mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan harapan siswa akan mampu memahami substansi dengan mudah (Widyastuti, 2021). Sejalan dengan itu, kemampuan guru dalam pelibatan kurikulum ini juga tidak lepas dari keprofesionalan guru, dimana dalam penelitian (Serdenciuc, 2016) bahwa guru yang profesional mamapu menyelenggarakan proses belajar dengan interaktif yang akan meningkatkan daya tarik pembelajaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Paradigma kurikulum merdeka bagi guru sekolah dasar merupakan hal yang baru. Peralihan kurikulum 2013 menjadi kurikulum operasional merdeka merupakan hal yang sangat baru. Kurikulum merdeka merupakan pengimplementasian kurikulum setelah pandemi dan akan diimplementasikan seutuhnya di lembaga pendidikan. Kurikulum ini telah diimplementasikan secara terbatas di berbagai jenjang salah satunya Sekolah Dasar. Dari hasil yang didapatkan dari kajian akademik kurikulum bahwasanya kurikulum ini dapat diimplementasikan di berbagai kawasan di Indonesia. Persiapan guru menghadapi kurikulum merdeka ini dengan cara mempersiapkan wawasan dan informasi mengenai kurikulum merdeka ini dengan cara mengikuti beberapa pelatihan dan workshop yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun swasta. Guru sekolah dasar memberikan respon antusias dalam

pengimplementasian kurikulum ini dikarenakan salah satu prinsip fleksibilitas yang memberikan ruang bagi guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan berpihak pada peserta didik.

Implementasi kurikulum merdeka merupakan salah satu hasil dari perombakan kurikulum yang sudah diterapkan. Masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan baik secara substansi maupun teknis. Guru juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan dari kurikulum operasional sekolah ini, dikarenakan paham akan situasi dan kondisi di lingkungan belajar. Pelaksanaan kurikulum merdeka di Lembaga Pendidikan telah diimplementasikan di beberapa Lembaga sekolah. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bahwasanya diperlukan sosialisasi secara bertahap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini.

Pada proses penelitian, masih terdapat keterbatasan peneliti dalam mengidentifikasi aspek yang terdapat pada kurikulum merdeka di sekolah dasar, diantaranya hasil wawancara masih secara umum belum sampai kepada proses penyusunan perangkat yang diterapkan pada kurikulum merdeka nantinya. Hal ini sangat penting dikarenakan pada penyusunan kurikulum tidak hanya sebatas mengetahui opini dari guru maupun pihak sekolah terhadap rencana pelaksanaan kurikulum merdeka ini.

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan memberikan gambaran mengenai paradigma kurikulum merdeka bagi guru sekolah dasar, yang nantinya memberikan kesempatan untuk peneliti lain dalam mengambil tema yang relevan. Penelitian ini hanya terfokus pada pendapat dari guru mengenai kurikulum merdeka saja dan keterlaksanaannya di sekolah dasar. Diharapkan terdapat penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pada proses pemebeajarannya hingga perangkat yang digunakan dalam kurikulum merdeka. Namun, keterbatasan penelitian nantinya baru sekedar di jenjang tertentu saja, diperlukan dalam beberapa tahun untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran di semua jenjang sekolah dasar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada keluarga besar Prodi PGSD dan mahasiswa PGSD semester 4 yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeini, khurotul. (2019). the Implementation of Curriculum 2013 Revision on Lesson Plans Made By English Teachers of Sman 2 Magelang in School Year 2018/2019. *Journal of Research on Applied Linguistics, Language, and Language Teaching*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.31002/jrlt.v2i1.424>
- Ainia, D. K. (2020). “Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter.” *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Astutik, D., Yuhastina, Y., Ghufonudin, G., & Parahita, B. N. (2022). Guru Dan Proses Pendidikan Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 46–54. <https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i1.p46-54>
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia’s learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85(April), 102436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Cheung, A. C. K., & Man Wong, P. (2012). Factors affecting the implementation of curriculum reform in Hong Kong. *International Journal of Educational Management*, 26(1), 39–54. <https://doi.org/10.1108/09513541211194374>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2), 155–164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2410>

- Fatma, N. E., & Mustafa, E. (2016). The effects of student-content interaction on academic performance in distance-learning courses. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications*, 7(3), 60–68. www.ijonte.org
- Fullan, M. (2006). *Advance praise for the new meaning of educational change (4th ed.)*.
- Gopal, R., Singh, V., & Aggarwal, A. (2021). Impact of online classes on the satisfaction and performance of students during the pandemic period of COVID 19. *Education and Information Technologies*, 26(6), 6923–6947. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10523-1>
- Huberman, M. B. M. A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press.
- Kemdikbudristek, P. (n.d.). *Kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi*.
- Kholisdinuka, A. (2020). *Lebih Dari Guru Biasa, Guru Penggerak Kemendikbud Bakal Punya Tugas Ini*. <https://news.detik.com>.
- Li, Y., Zhang, X., Dai, D. Y., & Hu, W. (2021). Curriculum Innovation in Times of the COVID-19 Pandemic: The Thinking-Based Instruction Theory and Its Application. *Frontiers in Psychology*, 12(April), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.601607>
- Pratiwi, I., & Utama, B. (2020). Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Darurat Covid-19: Telaah Demografi Atas Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 81. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.539>
- Puskurbuk. (2020). *Laporan Kinerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan Tahun 2020*.
- Rosidah, C. T., Pramulia, P., & Susiloningsih, W. (2021). Analisis Kesiapan Guru Mengimplementasikan Asesmen. *Jurnal Pendidikan Dasar, Vol 12 No(1)*, 87–103.
- Rozandy, M. P. ., & Koten, Y. P. (2021). Susunan Staf Redaksi. *Jurnal IN CREATE*, 8, 11–17.
- Serdenciuc, N. L. (2016). Being a Teacher in a Digital Era. *International Journal of Social and Educational Innovation*, 3(5), 73–80.
- Suyanto, S. (2017). A reflection on the implementation of a new curriculum in Indonesia: A crucial problem on school readiness. *AIP Conference Proceedings*, 1868(August 2017). <https://doi.org/10.1063/1.4995218>
- Trebeck, K., Higgins, B., Huw Aaron, Murdie, A., Welsh Government, Education, Education Wales, Llywodraeth Cymru Welsh Governemnt, Fitria, Children’s Commissioner for Wales, & OECD. (2021). Curriculum (re)design: A series of thematic reports from the OECD Education 2030 project.
- Valverde, G. A. (2002). *According to the Book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks*.
- Widyastuti, A. (2021). *Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring Luring, BDR*. Elex Media Komputindo.
- Wijaya, A., Mustofa, M. S., & Husain, F. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1), 46–50. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v2i1.42325>